

Upaya Fifa dalam Melindungi Hak Pekerja Migran di Qatar Menjelang Piala Dunia 2022

Muhammad Farid Agustama; Bagus Sigit Sunarko; Fuat Albayumi

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember,
Jember 68121, Indonesia

e-mail: fagustama63@gmail.com

Abstract

After winning the right to host 2022 World Cup, Qatar is exposed to migrant workers' problems which have attracted attention of the international community. Migrant workers building infrastructure find themselves in a discriminatory and exploitative treatment. Amnesty International identified hundreds of migrant workers employed on the Khalifa Stadium and the Aspire Zone were being subjected to human rights abuses by the companies for which they worked. According to human rights groups, this is a consequence of the kafala system which is very familiar with modern slavery practices. As one of the main actors of the World Cup in Qatar, FIFA recognized its international significance brings a responsibility to influence decision-makers in Qatar. FIFA has also urged Qatari Government to comply the ILO's core labour standards into labour reforms, and must be introduced quickly with lasting effect. Hence, this research aims to analyze acts taken by FIFA in its efforts to influence policies related to migrant workers in Qatar. Moreover, to analyze the issue, this research will use two theoretical approaches regarding the concepts of domestic structure and international institutionalization. These two concepts are likely to interact in determining the ability of transnational actors to bring about policy changes.

Keywords: FIFA, Qatar, World Cup 2022, Migrant Workers, Kafala, Labour Law Reforms

1. Pendahuluan

Setelah hak *hosting* Piala Dunia 2022 dimandatkan oleh FIFA kepada Qatar tahun 2010 silam, isu pekerja migran menjadi topik utama yang menarik perhatian komunitas internasional. Sebagai negara dengan populasi yang rendah, Qatar sangat bergantung pada tenaga kerja asing untuk membangun sejumlah fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk menyelenggarakan Piala Dunia tersebut. Menurut data tahun 2013-2016 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan dan Statistik Qatar, 90 persen dari total populasi Qatar terdiri dari pekerja migran, dimana 40 persennya aktif bekerja di bidang konstruksi infrastruktur (Snoj, 2017).

Dengan populasi pekerja migran yang sangat dominan di Qatar, membuat mereka rentan terhadap praktik diskriminasi dan eksploitasi. Laporan Amnesty Internasional berjudul "The Ugly Side of The Beautiful Game" menunjukkan ratusan pekerja migran yang bekerja di proyek pembangunan stadion Khalifa dan Aspire Zone mendapat perlakuan diskriminatif dan eksploitatif oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Banyak diantara pekerja migran yang telat dan tidak diberi upah sesuai dengan kontrak kerja. Mereka juga tidak mendapat izin tinggal, paspor disita, tempat tinggal tidak memadai, hingga diharuskan bekerja melebihi batas waktu yang ditentukan (Amnesty International, 2016).

Komunitas internasional menilai bahwa salah satu penyebab masalah tersebut ialah keberadaan UU No. 4 Tahun 2009. Di bawah UU ini, setiap pekerja migran di Qatar terikat dengan "sponsorship system" atau dapat disebut sistem kafala. Bagi negara-negara Arab Teluk termasuk Qatar, kafala adalah sistem yang lazim diterapkan kepada pekerja migran. Inti dari sistem tersebut adalah majikan atau perusahaan memiliki tanggung jawab penuh

terhadap pekerja migran, mulai dari upah pekerja, kondisi kerja pekerja hingga aturan masuk dan keluar negara.

Namun pada praktiknya, kontrol yang ketat dari majikan seringkali mengarah pada hal-hal negatif yang justru melanggar hak-hak pekerja migran. Misalnya penyitaan paspor dan dokumen identitas, yang dapat melanggar *freedom of movement*. Situasi demikian menandakan pekerja migran terjebak dalam sistem eksploitatif yang dianggap sebagai perwujudan dari perbudakan masa kini atau *modern slavery*.

Sebagai salah satu aktor utama yang terlibat dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022, FIFA dianggap telah gagal dalam melindungi hak setiap individu yang terkena dampak dari aktivitas globalnya. FIFA dinilai menjadi aktor yang patut disalahkan, karena keputusannya memberikan hak tuan rumah Piala Dunia 2022 kepada negara dengan rekam jejak buruk soal isu HAM (Ugochukwu, 2015).

Tidak sedikit badan-badan penggiat HAM yang kemudian meminta FIFA untuk terlibat dalam menangani persoalan pekerja migran di Qatar. Mereka bahkan menyampaikan tuntutan kepada FIFA agar menggunakan pengaruhnya untuk mendesak pemerintah Qatar mereformasi sistem kafala, termasuk kebijakan pekerja migran yang berkaitan.

Menyikapi datangnya tuntutan tersebut, FIFA mengakui tanggung jawab dan kepentingannya untuk mempengaruhi para pemangku kepentingan di Qatar. Oleh sebab itu FIFA pun mendesak pemerintah Qatar agar segera melakukan perubahan terhadap kebijakan pekerja migrannya secara konsisten dan berkelanjutan, sesuai dengan standar ketenagakerjaan yang ditetapkan ILO (FIFA, 2013).

FIFA menyampaikan bila pihaknya akan mendukung dan memfasilitasi proses reformasi kebijakan pekerja migran secara efektif. FIFA ingin memastikan jika para pekerja migran, khususnya yang bekerja di proyek Piala Dunia 2022, dapat bekerja dengan kondisi kerja yang layak. Hal ini karena FIFA menyimpan rasa optimis yang tinggi untuk menjadikan turnamen Piala Dunia 2022 sebagai pemicu perubahan sosial yang positif bagi kesejahteraan pekerja migran (Ganji, 2016: 237).

Sembari menerima tekanan, Qatar perlahan mulai bergerak untuk mereformasi kebijakan pekerja migrannya. Berawal di bulan Desember 2016, pemerintah Qatar secara resmi mengeluarkan kebijakan baru yang menggantikan eksistensi sistem kafala “sponsorship system” menjadi “contract-based system”. Diikuti pada Oktober 2017 saat pemerintah Qatar mengumumkan serangkaian kebijakan yang berkomitmen dalam mematuhi standar ketenagakerjaan ILO, termasuk menyepakati kerjasama dengan ILO untuk mereformasi sistem kafala secara komprehensif. Kemudian di bulan Oktober 2018, kebijakan terkait *free exit permit* mulai diterapkan bagi pekerja migran yang ingin pulang ke negara asalnya.

Pencapaian signifikan pemerintah Qatar atas reformasi kebijakan yang dilakukannya setiap tahun mendapat apresiasi dari FIFA. FIFA mengatakan bahwa Qatar tidak saja melindungi hak pekerja migran di proyek Piala Dunia 2022, melainkan hak pekerja migran secara keseluruhan. FIFA menambahkan pihaknya telah bekerjasama dengan erat bersama pemerintah Qatar dan para *stakeholder* terkait lainnya guna menjamin hak-hak pekerja migran terlindungi (Gulf-Times, 2018).

Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana langkah-langkah yang dilakukan FIFA dalam upayanya mempengaruhi kebijakan terkait pekerja migran di Qatar.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik yang disebut *library research* untuk mendapatkan data sekunder, yang berasal dari hasil pengamatan pihak lain dan dianggap paling relevan terhadap isu atau fenomena yang diteliti. Adapun pengumpulan data sekunder tersebut diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku, buku elektronik (*e-book*), jurnal, publikasi ilmiah, *report* dan internet. Sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-kualitatif, dimana data yang terkumpul akan dianalisis dan diinterpretasikan hingga menghasilkan sebuah kesimpulan masalah dari fenomena yang diteliti.

3. Hasil dan Diskusi

Praktik diskriminatif dan eksploitatif yang dialami pekerja migran di Qatar, yang terhubung dengan pengerjaan sejumlah *venue* Piala Dunia 2022 telah membuat FIFA tidak tinggal diam. FIFA berusaha menawarkan solusi guna mengatasi kompleksitas permasalahan hak-hak pekerja migran, baik dalam pertemuannya dengan elit pemerintah maupun dalam kerjasamanya bersama para aktor yang terlibat. Hal tersebut tentunya dilakukan dengan maksud agar pemerintah Qatar segera memperbaiki kebijakan perburuhannya terkait pekerja migran. Pada konteks ini, secara garis besar, upaya FIFA dalam mempengaruhi pemerintah Qatar untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan pekerja migrannya dapat dijelaskan melalui dua fokus pembahasan.

Pertama, FIFA menjalin kerjasama bersama aktor domestik yang secara teoritis dicirikan sebagai hubungan “coalition-building”. Kerjasama dengan aktor domestik merupakan langkah penting bagi FIFA, demi memperoleh dukungan terhadap ide perubahan atau kepentingan yang dibawanya. Kedua, mengenai upayanya dalam merangkul aktor transnasional untuk bekerjasama melalui hubungan “transnational coalition”.

Terjalannya kerjasama dengan aktor transnasional juga merupakan langkah penting lainnya untuk memperkuat pengaruh FIFA di Qatar. Ini karena FIFA dan aktor transnasional berusaha memanfaatkan keberadaan rezim ketenagakerjaan internasional untuk merealisasikan kepentingannya melindungi hak-hak pekerja migran. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat membawa pengaruh konklusif dalam konteks perubahan kebijakan pekerja migran.

Adapun langkah-langkah konkrit yang dilakukan FIFA dalam kerjasamanya dengan aktor domestik dan aktor transnasional tersebut dijelaskan lebih lanjut seperti berikut.

“Coalition-Building” dengan *Supreme Committee for Delivery & Legacy* (SCDL)

Supreme Committee for Delivery & Legacy (SCDL) adalah badan bentukan pemerintah Qatar pada tahun 2011, yang berwenang dalam mempersiapkan segala sarana infrastruktur untuk keperluan Piala Dunia 2022. Sejak awal pembentukannya, SCDL adalah mitra dekat FIFA di Qatar. Bahkan dapat dikatakan bahwa SCDL merupakan badan atau organisasi antara FIFA dengan pemerintah negara tuan rumah Piala Dunia 2022 (ter Haar, 2018: 150).

Dalam kerjasamanya, terdapat dua langkah konkrit yang dilakukan FIFA dan SCDL terkait perlindungan hak pekerja migran di Qatar. Diantaranya adalah penerapan program kesejahteraan pekerja melalui *Worker Welfare Standards* (WWS), dan pelaksanaan inspeksi terhadap kondisi kerja pekerja migran di proyek Piala Dunia 2022. Inspeksi ini dilaksanakan di bawah format *labour rights monitoring and enforcement mechanisms*, guna memastikan hak-hak pekerja migran terpenuhi (FIFA, 2017: 12-13). Seiring menjalankan dua bentuk upaya tersebut, FIFA dan SCDL juga berpartisipasi dalam dialog melalui pertemuannya

bersama pemerintah Qatar untuk membahas wacana reformasi kebijakan terkait pekerja migran.

Mengenai WWS, program ini dibentuk oleh SCDL setelah datangnya desakan dari FIFA. Pada November 2013, FIFA ingin Qatar menerapkan kondisi kerja yang adil dan berkelanjutan. Permintaan tersebut mengacu pada praktik diskriminatif dan eksploitatif yang terjadi dapat mempengaruhi kehidupan 1,3 juta pekerja migran. Selaku mitra dekatnya di Qatar, SCDL menanggapi dengan berjanji untuk menerapkan sebuah program tentang standar kesejahteraan pekerja bagi perusahaan atau kontraktor yang mempekerjakan pekerja migran di proyek infrastruktur Piala Dunia 2022 (Gibson, 2014).

Pada Februari 2014, WWS secara resmi diterapkan. WWS bertujuan untuk meningkatkan kondisi dan kehidupan pekerja migran yang bekerja di proyek infrastruktur Piala Dunia 2022. WWS mencakup akomodasi tempat tinggal, layanan kesehatan dan keselamatan, layanan pengaduan melalui *Workers' Welfare Forums* (WWF), rekrutmen kerja, kontrak kerja, pembayaran upah, serta pemutusan hubungan kerja dan pemulangan ke negara asal. Selain itu, aturan-aturan dalam WWS wajib dipatuhi serta mengikat secara kontrak bagi perusahaan dan kontraktor yang menaungi para pekerja migran.

Di satu sisi, FIFA mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung diterapkannya WWS. Di sisi lain, FIFA menganggap WWS belum optimal sehingga perlu diperbarui dan ditinjau secara berkala. Hal itu dinyatakan setelah terlaksananya inspeksi ke sejumlah proyek infrastruktur Piala Dunia 2022 di tahun 2016. Melalui inspeksinya dengan SCDL, FIFA menemukan dua kasus kematian pekerja pada proyek pembangunan stadion Khalifa Internasional dan stadion Al Wakrah (Thuer, 2017: 62).

Lalu ditemukan pula lima kasus kematian pekerja, namun tidak terhubung langsung atau “non-work-related” dengan apa yang pekerja kerjakan di lokasi pembangunan. Atas insiden tersebut, FIFA menyampaikan bila hal ini berhubungan dengan efektivitas WWS dalam mengatasi ketidakpatuhan perusahaan dan kontraktor yang berada di proyek Piala Dunia 2022. SCDL lalu berjanji untuk melakukan *blacklist* kepada pihak-pihak kontraktor yang tidak taat terhadap WWS (SCDL, 2017: 2).

Selain itu, SCDL dan FIFA turut melangsungkan pertemuan bersama elit pemerintah untuk berdialog terkait wacana reformasi kebijakan pekerja migran. Salah satu dialog terpentingnya terjadi pada April 2016, saat FIFA menghadiri pertemuan dengan Emir dan Perdana Menteri Qatar yang difasilitasi oleh SCDL. Melalui pertemuan ini, FIFA selaku aktor transnasional melancarkan *lobbying* kepada elit pemerintah dengan menegaskan bahwa sangat penting bagi Qatar untuk mematuhi nilai dan norma ketenagakerjaan internasional. FIFA menantikan tindakan konkrit dari pemerintah Qatar untuk segera mereformasi kebijakan pekerja migrannya, beserta perubahan sistem kafala yang harus ditegakkan (SCDL, 2016).

Adanya tuntutan dan ide perubahan yang disampaikan FIFA pada pertemuan tersebut nyatanya sesuai dengan keyakinan serta tujuan yang dimiliki elit pembuat kebijakan. Di bulan Desember 2016, sistem kafala akhirnya direformasi melalui kebijakan baru yang bernama “contract-based system”. Namun, FIFA memandang bahwa sistem kafala belum sepenuhnya berakhir. Kebijakan baru masih meninggalkan karakter eksploitatif dari sistem kafala dalam memberikan *power* lebih bagi majikan atau perusahaan untuk mengendalikan pekerja mereka. Oleh karenanya, FIFA menyatakan akan terus menekan pemerintah Qatar terkait kondisi pekerja migran beserta kebijakan yang berkaitan (Cornwell, 2016).

“Transnational Coalition” dengan *Building & Woodworkers International (BWI)*

Building & Woodworkers International (BWI) merupakan sebuah serikat pekerja internasional di bidang bahan bangunan, kayu, kehutanan dan industri terkait lainnya. BWI mempunyai misi dalam mempromosikan dan membela hak-hak serikat pekerja, meningkatkan kekuatan serikat pekerja, hingga mempengaruhi kebijakan.

Dalam isu perlindungan hak-hak pekerja migran di Qatar, BWI mencapai kesepakatan untuk bekerjasama dengan FIFA pada Mei 2017. FIFA dan BWI mengidentifikasi poin-poin penting yang mereka anggap relevan guna menangani masalah hak-hak pekerja migran. Dalam kerjasamanya, langkah konkrit yang dilakukan FIFA dan BWI berfokus pada dua hal.

Pertama adalah pelaksanaan inspeksi terhadap kondisi kerja pekerja migran di lokasi proyek Piala Dunia 2022. FIFA berpandangan bahwa setiap perusahaan dan kontraktor yang menaungi pekerja migran harus patuh pada standar atau prinsip-prinsip ketenagakerjaan internasional. Dengan kata lain, pelaksanaan inspeksi tenaga kerja ini bertujuan untuk memastikan hak-hak pekerja migran terpenuhi sesuai standar ketenagakerjaan internasional (Heerdt, 2018: 89).

Adapun dalam pelaksanaannya, inspeksi tenaga kerja ini tak lepas dari partisipasi SCDL selaku badan yang bertanggung jawab menaungi perusahaan atau kontraktor beserta pekerja migran di proyek Piala Dunia 2022. Ketiganya melakukan inspeksi bersama atau *Joint Labour Inspection* di bawah format “The Joint Working Group (JWG)”. Aspek-aspek inspeksi bersama yang ada di JWG terdiri dari penilaian efektivitas WWS, penilaian kesehatan dan keselamatan kerja, hingga pelatihan untuk pekerja yang dilakukan oleh BWI (SCDL, 2017: 9).

Berdasarkan hasil temuan dari inspeksinya sepanjang tahun 2017, FIFA dan BWI mengapresiasi langkah SCDL yang telah menindaklanjuti kasus kematian pekerja dengan memasukkan 3 nama kontraktor ke daftar *blacklist* dan 9 lainnya di ‘demobilisasi’. Namun, FIFA dan BWI menemukan persoalan utama di bidang keselamatan dan akomodasi. Hal itu disampaikan karena terdapat kondisi lingkungan kerja yang menantang bagi pekerja migran. Misalnya ketika para pekerja tersebut bekerja dengan alat-alat yang memerlukan gerakan berulang atau tenaga ekstra. Oleh sebab itu, FIFA dan BWI menyimpulkan bahwa SCDL perlu menyediakan forum kesehatan dan keselamatan teknis bagi pekerja di tiap lokasi proyek Piala Dunia 2022 (FHRAB, 2017: 21).

Di bidang akomodasi, terdapat persoalan mengenai biaya perekrutan. FIFA menyadari bahwa masalah biaya perekrutan tak lepas dari sistem kafala yang belum benar-benar usai (Thuer, 2017: 63). Menurut FIFA, sulit untuk meniadakan biaya rekrutmen karena agen perekrutan di negara asal pekerja migran sangat banyak dan tidak dilarang oleh pemerintah setempat. Sehubungan dengan ini, FIFA menyatakan pekerja migran tidak seharusnya dibebani oleh biaya rekrutmen. FIFA pun ingin melibatkan kontraktor atau sub-kontraktor untuk mempromosikan tanggung jawab praktik rekrutmen sejalan dengan standar ketenagakerjaan internasional (FHRAB, 2017: 27).

Inisiatif untuk melaksanakan inspeksi tenaga kerja bersama dinilai cukup solutif. Hal tersebut berhubungan dengan teguran dari ILO kepada Qatar melalui Pasal 26 pada Juni 2014, mengenai kasus ketidapatuhannya terhadap *Labour Inspection Convention No. 81*. Adanya teguran ini mencerminkan bahwa praktik pengawasan ketenagakerjaan di Qatar sangatlah minim, yang artinya proses pemantauan dan penegakan hak-hak pekerja tidak berlangsung optimal. ILO bahkan telah melakukan penyelidikan terhadap Qatar dan mengutus sebuah komisi investigasi (Thuer, 2017: 14-15).

Namun seiring dengan praktik inspeksi tenaga kerja yang dijalankan oleh FIFA bersama BWI dan SCDL, Qatar pun mulai memperhatikan perlunya praktik pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan penegakan hukum yang melindungi hak-hak pekerja migran (ter Haar, 2018: 148). Hal itu ditegaskan pada Oktober 2017 saat pemerintah Qatar berkomitmen mematuhi standar ketenagakerjaan ILO yang ingin mereformasi sistem kafala secara menyeluruh, dan mengumumkan serangkaian kebijakan yang salah satunya terkait mengizinkan pihak luar melakukan inspeksi tenaga kerja di Qatar.

Kondisi demikian dinilai penting karena Qatar sendiri belum secara utuh mengadopsi prinsip-prinsip konvensi ILO ke dalam kebijakan tenaga kerjanya (Erfani, 2015). Di waktu yang berdekatan, ILO mengambil sikap dengan menutup kasus ketidakpatuhan Qatar terhadap *Labour Inspection Convention No. 81* (BBC, 2017). Ini karena praktik inspeksi di Qatar menjadi semakin efisien dan terus meningkat hingga mencapai jumlah 294. Menteri Tenaga Kerja Qatar juga telah membentuk Departemen baru yang bertugas dalam urusan kesehatan dan keselamatan kerja (ter Haar, 2018: 149).

Dikeluarkannya kebijakan yang mengizinkan inspeksi oleh pihak luar, bersamaan dengan sikap ILO yang tidak lagi mempersoalkan kasus *Labour Inspection Convention*, menunjukkan bahwa inspeksi tenaga kerja bersama yang dilaksanakan FIFA secara tidak langsung mampu mendorong Qatar untuk taat pada aturan rezim ketenagakerjaan internasional dan mengadopsinya ke dalam kebijakan pekerja migrannya. Fenomena ini sesuai dengan asumsi Thomas Risse-Kappen, bahwa norma-norma yang semakin teregulasi dalam rezim atau lembaga internasional cenderung melegitimasi kegiatan transnasional untuk mempengaruhi kebijakan domestik suatu negara. Itu artinya, inspeksi tenaga kerja merupakan ‘alat’ legitimasi yang mengacu pada norma-norma ketenagakerjaan, yang digunakan FIFA untuk mempengaruhi kebijakan di Qatar.

Koalisi Transnasional dalam *FIFA Human Rights Advisory Board* (FHRAB)

Langkah konkrit selanjutnya yang dilakukan FIFA dan BWI yaitu dengan menguatkan hubungan kerjasamanya melalui *FIFA Human Rights Advisory Board* (FHRAB). FHRAB sendiri adalah badan bentukan FIFA pada Maret 2017, yang secara umum berperan membantu FIFA mengupayakan penegakan HAM di setiap kegiatan globalnya sesuai mandat Statuta Pasal 3 dan *FIFA's Human Rights Policy*.

Setelah mencapai kesepakatan kerjasama pada Mei 2017, FIFA memutuskan untuk menempatkan perwakilan BWI ke dalam anggota FHRAB. Hal ini menjadikan FHRAB sebagai sebuah “multi-stakeholder coalition” yang keberadaannya turut didukung oleh berbagai *stakeholder*, seperti dengan adanya perwakilan PBB yang tergabung sebagai anggota. Kondisi demikian membuat peranan dari FHRAB semakin kuat dan meluas.

Dalam kaitannya dengan Qatar, FHRAB memiliki peran untuk mengobservasi kinerja FIFA dan BWI terkait pelaksanaan inspeksi bersamanya dengan SCDL, lalu ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi yang tepat kepada keduanya guna mengatasi persoalan hak-hak pekerja migran. Di samping itu, FHRAB berperan dalam mengadakan pertemuan bersama para pemangku kepentingan di Qatar untuk membahas agenda reformasi kebijakan pekerja migran.

Menyangkut perannya dalam melakukan observasi dan pemberian rekomendasi, FHRAB menuliskannya melalui laporan yang dirilis hingga akhir tahun 2018. Sebagai contoh, ketika FHRAB mengobservasi lalu menyarankan FIFA dan BWI untuk berdialog dengan SCDL, perihal penyediaan forum pengaduan pada aspek kesehatan dan keselamatan teknis bagi pekerja di tiap lokasi proyek Piala Dunia 2022. FIFA dan BWI mengkonfirmasi,

pihaknya bersama SCDL telah memperkuat mekanisme tersebut melalui pembentukan komite manajemen kesehatan dan keselamatan pekerja, mengingat di Qatar sendiri tidak ada sebuah serikat pekerja lokal karena pihak pemerintah sangat membatasinya (FHRAB, 2018: 55).

SCDL juga merespon dengan meluncurkan layanan pengaduan multi-bahasa. Hal ini menjadi penting bagi pekerja migran, karena banyak dari mereka yang tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Ditambah dengan layanan pengaduan milik pemerintah hanya menerima keluhan menggunakan bahasa Inggris. Sebagai hasilnya, jumlah pengaduan yang diajukan pekerja migran meningkat hingga 375% pada tahun 2018 (SCDL, 2018: 24).

Selanjutnya, FHRAB mengingatkan FIFA agar melibatkan kontraktor dan sub-kontraktor untuk menerapkan praktik perekrutan yang sesuai dengan standar internasional. Mengenai hal ini, FIFA menyatakan bahwa tidak semestinya para pekerja migran terbebani oleh biaya perekrutan. FIFA telah menyampaikan kepada semua kontraktor dan sub-kontraktor, untuk mengatasi biaya rekrutmen sejalan dengan standar ketenagakerjaan internasional. Bersama dengan SCDL, FIFA berkonsultasi untuk mencari cara guna mengganti biaya rekrutmen yang dibayarkan oleh pekerja migran sesuai pedoman WWS (FHRAB, 2018: 58-59).

Upaya tersebut lalu membuahkan hasil yang tercermin pada Maret 2018, dimana SCDL secara resmi memutuskan untuk mewajibkan para kontraktor mengganti biaya rekrutmen yang telah dikeluarkan oleh pekerja migran. Sejumlah kontraktor setuju untuk mengganti biaya rekrutmen senilai 3 juta Riyal Qatar kepada pekerja migran (SCDL, 2018). Adapun jika kontraktor tidak membayar biaya rekrutmen, maka kontraktor tersebut harus mengganti jumlah yang sesuai dengan ketentuan ILO.

Selain menyampaikan rekomendasi kepada FIFA dan BWI untuk menangani persoalan hak pekerja migran, FHRAB terlibat dalam dialog bersama para pemangku kepentingan di Qatar. Pada 1-4 Oktober 2018, FHRAB bersama FIFA, BWI, dan SCDL melakukan pertemuan yang difasilitasi oleh ILO di kantor lokalnya di Doha. Dalam pertemuan yang ikut diawasi oleh Menteri Tenaga Kerja Qatar, Direktur Komunikasi Pemerintah Qatar dan Komite HAM Nasional Qatar tersebut, FHRAB melobi elit pemerintah yang meminta agar kebijakan tentang *free exit permit* diterapkan dalam waktu dekat (BHRRC, 2018). Menurut FIFA, *exit permit* merupakan masalah pada salah satu sistem hukum yang perlu dilakukan perbaikan (Thuer, 2017: 63).

Dengan dilaksanakannya pertemuan yang difasilitasi oleh ILO di kantor lokalnya di Doha, mengindikasikan bahwa kehadiran FHRAB mendapat dukungan dari organisasi internasional. ILO selaku organisasi internasional, serta merupakan sebuah rezim ketenagakerjaan internasional, seolah-olah berperan menjadi fasilitator bagi FHRAB untuk menghadapi hambatan serta halangan dalam *lobbying* yang dilakukannya kepada pemerintah Qatar.

Kondisi demikian dapat membuat pemerintah Qatar enggan untuk menolak kepentingan yang dibawa oleh FHRAB. Ini karena dukungan dari organisasi internasional tersebut menjadi 'alat' legitimasi bagi FHRAB untuk mempengaruhi pemerintah Qatar itu sendiri. Mengacu pada asumsi Thomas Risse-Kappen dalam teorinya, bahwa lembaga internasional dapat berperan sebagai fasilitator bagi aktor transnasional guna mendapat akses dalam mempengaruhi kebijakan suatu negara.

Dengan mengetahui hal tersebut, pemerintah Qatar akhirnya setuju untuk memberlakukan kebijakan terkait *exit permit* pada 29 Oktober 2018. Melalui kebijakan baru ini, mayoritas

pekerja migran dapat meninggalkan Qatar atau pulang ke negara asalnya tanpa perlu meminta persetujuan dari perusahaan tempat mereka bekerja.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa upaya FIFA dalam mempengaruhi kebijakan terkait pekerja migran di Qatar mengacu pada dua faktor. Pertama, mengenai kemampuannya menjalin hubungan “coalition-building” dengan aktor domestik guna mendukung ide perubahan atau kepentingan yang dibawanya. Kedua, kemampuan FIFA bersama koalisi transnasionalnya dalam memanfaatkan keberadaan rezim atau lembaga internasional. Adanya norma-norma ketenagakerjaan yang teregulasi dalam rezim internasional membuat FIFA dan koalisinya dapat leluasa memberikan pengaruhnya. Dengan kata lain, keadaan ini cenderung melegitimasi tindakan FIFA dan koalisinya untuk mempengaruhi kebijakan di Qatar.

Daftar Pustaka

Buku

Risse-Kappen, T. 1995. *Bringing Transnational Relations Back In*. Cambridge: Cambridge University Press.

_____. 1999. *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*. Cambridge: Cambridge University Press.

Laporan

FIFA. 2017. *FIFA Activity Update on Human Rights*. Zurich: Fédération Internationale de Football Association.

FHRAB. 2017. *Report by the FIFA Human Rights Advisory Board: First Report with the Advisory Board's Recommendation and an Update by FIFA*. Zurich: FIFA.

_____. 2018. *Second Report by the FIFA Human Rights Advisory Board: Including the Board's Recommendation and FIFA's Responses*. Zurich: FIFA.

International, Amnesty. 2016. *The Ugly Side of the Beautiful Game*. London: Amnesty International Ltd.

SCDL. 2017. *Joint Working Group 2017 Report*. Doha: Supreme Committee for Delivery & Legacy.

_____. 2018. *Joint Working Group 2018 Report*. Doha: Supreme Committee for Delivery & Legacy.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Thuer, D. 2017. Qatar 2022, the World Cup of modern slavery – Is FIFA playing fair?. *Tesis*. Seville: European Master's Degree in Human Rights & Democratisation. University of Seville.

Jurnal

Erfani, A. 2015. Kicking Away Responsibility: FIFA's Role in Response to Migrant Worker Abuses in Qatar's 222 World Cup. *Sports Law Journal*. 22(2): 632-662.

Ganji, S. K. 2016. Leveraging the World Cup: Mega Sporting Events, Human Rights Risk, and Worker Welfare Reform in Qatar. *Journal on Migration and Human Security*. 4(4): 221-259.

Heerdt, D. 2018. Winning at the World Cup: A matter of protecting human rights and sharing responsibilities. *Netherlands Quarterly of Human Rights*. 36(2): 86-92.

ter Haar, B. P. (2018). The FIFA 2022 World Cup and Labour Rights - Seizing the Moment for Labour Law Reforms in Qatar. *Law Evolution*. 4(1): 140-164.

Artikel dari Internet

- _____. 2018. *Update Statement by FIFA's Human Rights Advisory Board Following the Board's Fourth Biannual Meeting*. https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/AB%20Statement_Fourth%20meeting_Oct2018.pdf. [Diakses pada 9 Juni 2019].
- Cornwell, A. 2016. *FIFA will continue to put pressure on Qatar over human rights: President*. <https://www.reuters.com/article/us-soccer-fifa-worldcup-qatar/fifa-will-continue-to-put-pressure-on-qatar-over-human-rights-president-idUSKBN14H14T>. [Diakses pada 15 Mei 2019].
- FIFA. 2013. *Meeting Between FIFA and the ITUC*. <https://www.fifa.com/worldcup/videos/meeting-between-fifa-and-the-ituc-2227304>. [Diakses pada 27 November 2018].
- Gibson, O. 2014. *Qatar commits to new welfare standards for World Cup workers*. <https://www.theguardian.com/world/2014/feb/11/qatar-world-cup-2022-workers-welfare-standards>. [Diakses pada 10 Mei 2019].
- Gulf-Times. 2018. *ILO, FIFA laud Qatar's human rights, labour reforms*. <https://www.gulf-times.com/story/614137/ILO-FIFA-laud-Qatar-s-human-rights-labour-reforms>. [Diakses pada 19 Januari 2019].
- _____. 2016. *FIFA President meets with Qatari leadership*. <https://www.sc.qa/en/news/fifa-president-gianni-infantino-qatar-emir-world-cup-2022>. [Diakses pada 12 Mei 2019].
- Snoj, J. 2017. *Population of Qatar by Nationality*. <http://priyadsouza.com/population-of-qatar-by-nationality-in-2017/>. [Diakses pada 4 Maret 2019].
- Ugochukwu, B. 2015. *Beyond Corruption: Qatar Migrant Workers and Issues in FIFA's Value Chain*. <https://www.cigionline.org/publications/beyond-corruption-qatar-migrant-workers-and-issues-fifas-value-chain>. [Diakses pada 8 Desember 2018].